

JARINGAN SOSIAL PRAKTEK PROSTITUSI TERSELUBUNG DI KAWASAN WISATA KOTA BATU

THE SOCIAL NETWORK OF COVERT PROSTITUTION PRACTICE IN THE AREA OF BATU CITY TOURISM

Oman Sukmana dan Rupiah Sari

Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang
Jl. Raya Tlogomas 246 Malang, Jawa Timur.
E-mail: osukmana@ymail.com dan rupiah_sari47@yahoo.com

Diterima: 25 Januari 2017; Direvisi: 24 Maret 2017; Disetujui: 13 April 2017

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keresahan akan praktik prostitusi terselubung di kawasan wisata Kota Batu, Malang, yang hampir sama sekali tidak terekspose keberadaanya, namun memiliki potensi dampak negatif bagi masyarakat baik secara sosial, psikologis, agama, dan budaya. Fokus penelitian ini diarahkan kepada: (1) bagaimana bentuk jaringan sosial praktik prostitusi terselubung di kawasan wisata kota Batu; dan (2) bagaimanakah peran dan fungsi masing unit dalam jaringan sosial praktik prostitusi terselubung di kawasan wisata kota Batu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus (*case study*). Lokasi penelitian dilakukan di kawasan wisata Songgoriti, Kota Batu. Subyek penelitian ditentukan secara *purposive*, yakni: pramuwisata (*tourguide*), tukang ojek, petuah Desa Songgokerto, pemilik villa, warga yang berjualan di sekitar kawasan wisata, dan Pekerja Seks Komersial (PSK). Kerangka teoritik yang dijadikan dasar analisis mengacu kepada perspektif teori jaringan sosial dari Turner. Temuan penelitian menunjukkan bahwa jaringan sosial praktik prostitusi terselubung terbentuk dengan melibatkan berbagai stakeholders, seperti: Pemakai (*user*), Tukang Ojek, *Tour Guide*, Pemilik Villa, Pekerja Seks Komersial (PSK), Pemilik Usaha Hiburan (Karaoke) dan *Billiard*, Pihak Oknum Pemerintah, dan Masyarakat. Jaringan sosial tersebut terbentuk karena adanya ikatan kepentingan (*interest*) yang sama, terutama kepentingan ekonomi.

Kata kunci: *jaringan sosial, prostitusi terselubung, kawasan wisata.*

Abstract

This research has been done due to phenomenon of covert prostitution practice in tourist area of Batu, East Java. Those phenomenon does not completely exposed. However, it seen as have potential negative impact on society, both socially, psychologically, religion, and culture. The focus of this research is aimed to: (1) how does the kind of social networking on the practice of covert prostitution in the tourist area of Batu city; and (2) how the roles and functions of each part of the social network of covert prostitution practice in the tourist area of Batu city. This study uses a qualitative approach with case study. The research location is in the tourist area Songgoriti, Batu City. The research subjects determed by purposive, namely: tour-guide, motorcycle taxis driver, Village leaders of Songgokerto, villa owners, residents around the tourist areas, and commercial sex workers (PSK). The theoretical framework used as the basis of analysis refers to the perspective of social network theory of Turner. The research findings shows that social networking of covert prostitution practice is formed by involving various stakeholders, such as: User, Motorcycle taxis driver, Tour-guide, Villa owners, Commercial Sex Workers (PSK), Business Owners entertainment, such as Karaoke and Billiards, Government officials, and Society. The social network is formed because of profit interests, especially economic interests.

Keywords: *social networking, covert prostitution, tourism regions.*

PENDAHULUAN

Kota Batu, dikembangkan sebagai kawasan kota wisata utama di Jawa Timur. Dalam upaya mengembangkan Kota Batu sebagai kota wisata, pemerintah Kota Batu bekerjasama dengan berbagai investor membangun berbagai destinasi wisata buatan, seperti: Jawa Timur Park-1, Jawa Timur Park-2, *Batu Night Spectacular* (BNS), Tempat Wisata Paralayang, Taman Predators, Musium Angkot, Musium Satwa, dan sebagainya. Selain destinasi wisata buatan, Kota Batu juga mengembangkan destinasi wisata alam seperti wisata Air Terjun Coban Rondo, Air Terjun Coban Talun, Pemandian Songgoriti, Kolam Renang Selecta, Pemandian Air Panas Cagar, Wisata Gunung Panderman, dan sebagainya. Sementara untuk wisata budaya, antara lain dikembangkan kawasan Desa Wisata Bunga di Desa Sidomulyo, dan kawasan Desa Wisata Adat di Desa Punten.

Kebijakan pengembangan Kota Batu sebagai kawasan kota wisata memiliki dampak positif, antara lain seperti meningkatnya sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batu dari aspek pariwisata, dimana pajak pariwisata merupakan sumber utama PAD Kota Batu, dan penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat. Namun demikian, kebijakan pengembangan Kota Batu sebagai kawasan kota wisata juga memiliki dampak negatif, antara lain yakni munculnya praktik prostitusi terselubung.

Menurut Pitana dan Gayatri (2005) pariwisata telah menjadi salah satu industri terbesar di dunia, dan merupakan andalan utama dalam menghasilkan devisa di berbagai negara. Dengan pentingnya peranan pariwisata dalam pembangunan ekonomi, maka pariwisata sering disebut sebagai *passport to development, new kind of sugar, tool for regional development, invisible export, non-polluting industry*, dan sebagainya. Menurut Wahab (2003),

pariwisata adalah salah satu dari industri gaya baru yang mampu menyediakan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam hal kesempatan kerja, pendapatan, taraf hidup dan dalam mengaktifkan sektor produksi lain di dalam negara penerima wisatawan.

Namun, pariwisata juga terkait erat dengan berbagai penyakit sosial, seperti pelacuran, kriminalitas, dan penyalahgunaan narkoba. Mengenai keterkaitan antara kegiatan seks dengan pariwisata dikatakan bahwa seks (prostitusi) merupakan bagian integral dari pariwisata. Adalah suatu kenyataan yang tidak terbantahkan bahwa pemenuhan kebutuhan seksual merupakan salah satu motivasi orang melakukan perjalanan wisata. Bahkan sekitar 70-80 persen wisatawan dari Jepang dan negara-negara lain yang bepergian ke Asia motif seks sebagai tujuan utama perjalanan wisatanya (Pitana dan Gayatri, 2005).

Beberapa negara di Asia Tenggara, seperti Thailand dan Filipina, sudah menjadi Daerah Tujuan Wisata (DTW) seks sejak akhir tahun 1970-an karena praktik prostitusi di kawasan wisata kedua negara tersebut sudah sangat terbuka. Malaysia juga sudah merupakan salah satu titik simpul dalam peta wisata seks di kawasan Asia. Sementara di Indonesia, praktik prostitusi di beberapa kawasan wisata pada umumnya masih bersifat terselubung (Spillane, 2003). Fenomena praktik prostitusi merupakan fenomena sosial yang sangat menarik untuk dikaji, mulai dari praktik prostitusi resmi/lokalisasi dari pemerintah maupun prostitusi terselubung dengan kedok industri pariwisata. Kawasan prostitusi biasanya terletak pada kawasan wisata yang mendukung. Menurut Pitana dan Gayatri (2005) bahwa prostitusi tidak bisa dilepaskan dari fenomena kehidupan sosial masyarakat. Prostitusi juga merupakan salah satu bisnis yang selalu menyertai perkembangan sebuah destinasi pariwisata.

Meskipun prostitusi sudah berkembang di banyak negara Asia jauh sebelum berkembangnya industri pariwisata, tetapi perkembangan fenomena industri seks di kawasan ini jelas baru terjadi menyusul adopsi kebijakan pembangunan pariwisata secara besar-besaran di berbagai negara Asia sejak tahun 1960-an. Disusul mengalirnya dana bantuan internasional secara besar-besaran bagi pembangunan infrastruktur pariwisata sebagai bagian dari strategi pertumbuhan ekonomi yang dianut oleh negara-negara itu.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008), kata prostitusi mengandung makna suatu kesepakatan antara laki-laki dan perempuan untuk melakukan hubungan seksual dalam hal mana pihak lelaki membayar dengan sejumlah uang sebagai kompensasi pemenuhan kebutuhan biologis yang diberikan pihak perempuan, biasanya dilakukan di lokalisasi, hotel dan tempat lainnya sesuai kesepakatan. Secara etimologis prostitusi berasal dari bahasa Inggris, yaitu *prostitute* (*prostitution*) yang berarti pelacuran, perempuan jalang, atau hidup sebagai perempuan jalang. Sedangkan dalam realita saat ini, menurut kacamata orang awam, prostitusi diartikan sebagai suatu perbuatan menjual diri dengan memberi kenikmatan seksual pada kaum laki-laki.

Menurut Bonger (dalam Kartono, 1981) prostitusi adalah gejala kemasyarakatan di mana wanita menjual diri melakukan perbuatan-perbuatan seksual sebagai mata pencarian. Sedangkan menurut Koentjoro (2004), prostitusi atau pelacuran berasal dari bahasa Latin yaitu *pro-stituere* (*pro-stauree*) yang berarti membiarkan diri berbuat zina, melakukan persundalan, pencabulan, dan pergendakan. Sehingga pelacuran atau prostitusi bisa diartikan sebagai perjualan jasa seksual, seperti oral seks atau hubungan seks tanpa uang. Pelacur wanita disebut *prostitutue*,

sundal, balon, lonte, sedangkan pelacur pria disebut gigolo. Pelaku pelacur kebanyakan dilakukan oleh wanita. Menurut Bonger (dalam Mudjijono, 2005) prostitusi adalah gejala sosial ketika wanita menyediakan dirinya untuk perbuatan seksual sebagai mata pencahariannya. Sementara, Commenge (dalam Soedjono, 1977) disebutkan bahwa prostitusi adalah suatu perbuatan dimana seorang wanita memperdagangkan atau menjual tubuhnya untuk memperoleh pembayaran dari laki-laki. Karena secara etimologis, kata prostitusi berarti menempatkan, dihadapkan, hal menawarkan, menjual, menjajakan, namun secara umum kata *proatituti* diartikan sebagai penyerahan diri kepada banyak macam orang dengan memperoleh balas jasa untuk pemuasan seksual orang itu. Parillo (2005) menyebut bahwa *prostitution is the act of selling sexual favors for money or goods* (prostitusi adalah tindakan menjual seks untuk tujuan mendapatkan uang atau barang-barang).

Selain dampak negatif berupa munculnya praktik prostitusi, berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa pariwisata telah merusak atau menghancurkan kebudayaan lokal. Pariwisata secara langsung memaksa ekspresi kebudayaan lokal untuk dimodifikasi agar sesuai dengan kebutuhan pariwisata. Ekspresi budaya dikomodifikasi agar dapat dijual kepada wisatawan (Pitana & Gayatri, 2005). Menurut Yoeti (2006), dengan berkembangnya pariwisata sebagai suatu industri ternyata banyak menimbulkan permasalahan sebagai pemanfaatan seni dan budaya yang dijadikan sebagai daya tarik atraksi wisata, dimana seni dan budaya dapat saja ditawarkan kepada wisatawan tanpa menghiraukan norma-norma yang berlaku. Muncul pro dan kontra para ahli mengenai peran turisme, namun satu hal dari peran turisme yang tidak menguntungkan bagi aktivitas ekonomi negara berkembang adalah

harga mahal *cost* sosial budaya yang harus dibayar (Koentjoro, 2004).

Menurut aktivitasnya, prostitusi dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu prostitusi yang terdaftar atau terorganisir dan prostitusi yang tidak terdaftar (Kartono, 1981). Prostitusi yang terdaftar atau terorganisir adalah jenis prostitusi yang pelakunya diawasi, pada umumnya mereka dilokalisasi dalam satu daerah tertentu. Penghuninya secara periodik harus memeriksakan diri kepada dokter atau petugas kesehatan dan mendapatkan suntikan serta pengobatan sebagai tindakan kesehatan dan keamanan umum. Sedangkan prostitusi yang tidak terdaftar, termasuk dalam kelompok ini adalah mereka yang melakukan prostitusi secara gelap-gelapan dan liar (terselubung), baik secara perorangan maupun dalam kelompok. Perbuatannya tidak terorganisir, tempatnya pun tidak tertentu bisa di sembarang tempat, baik mencari mangsa sendiri maupun melalui calo-calo dan panggilan. Mereka tidak mencatatkan diri kepada yang berwajib.

Munculnya praktik prostitusi di kawasan wisata, baik prostitusi terbuka maupun terselubung akan melibatkan berbagai pihak (*stakeholders*) yang berkepentingan. Praktik prostitusi tidak berdiri sendiri akan tetapi melibatkan relasi dari berbagai pihak yang berkepentingan, biasanya kepentingan ekonomi. Relasi berbagai pihak yang berkepentingan dalam munculnya praktik prostitusi ini kemudian membentuk pola jaringan sosial yang saling menguntungkan.

Menurut Wasserman dan Faust (1994), sebuah jaringan sosial adalah struktur sosial yang terdiri dari satu set aktor (seperti sebagai individu atau organisasi) dan satu set kompleks dari ikatan diadik antara aktor-aktor ini. Perspektif jaringan sosial menyediakan cara

yang jelas tentang menganalisis struktur dari entitas sosial secara keseluruhan. Studi tentang struktur ini menggunakan analisis jaringan sosial untuk mengidentifikasi pola-pola lokal dan global, mencari entitas berpengaruh, dan memeriksa dinamika jaringan. Menurut Turner (1998), analisis jaringan sebagai pendekatan teoritis sangat penting untuk memahami struktur sosial, yaitu bagaimana menggambarkan pola relasi di antara unit-unit sosial baik orang-orang, kolektifitas-kolektifitas, atau posisi-posisi. Menurut Simmel (Turner, 1998) inti dari konsep tentang struktur adalah pandangan bahwa struktur terdiri dari relasi-relasi dan tautan-tautan diantara berbagai entitas.

Jejaring sosial adalah suatu struktur sosial yang dibentuk dari simpul-simpul (yang umumnya adalah individu atau organisasi) yang dijalin dengan satu atau lebih tipe relasi spesifik seperti nilai, visi, ide, teman, keturunan, dan lain-lain. Sebuah jaringan sosial adalah suatu struktur sosial yang terdiri dari individu (atau organisasi) disebut “simpul” (*nodes*), yang terikat (terhubung) oleh satu atau lebih tipe hubungan saling ketergantungan tertentu, seperti persahabatan, kekerabatan, kepentingan bersama, pertukaran keuangan, hubungan kepercayaan, pengetahuan dan persepsi. Turner (1998) menyebutkan bahwa unit dari jaringan bisa berupa orang, posisi, korporasi atau aktor-aktor kolektif, atau gambaran setiap entitas. Secara umum, unit-unit ini dikonseptualisasikan sebagai titik-titik (*points*) atau simpul-simpul (*nodes*).

Pertukaran dalam jaringan dapat terjadi dalam dua tipe umum (Turner, 1998), yakni: (1) dimana aktor melakukan negosiasi (*negotiate*) dan tawar-menawar (*bargain*) atas distribusi sumberdaya yang dimiliki dengan sumberdaya pihak lain; dan (2) dimana aktor tidak melakukan negosiasi sumberdaya, namun mengharapkan bahwa akan mendapatkan keuntungan timbal

balik atas sumberdaya yang disediakan. Dalam konteks yang pertama disebut sebagai *negotiated exchange*, sementara yang kedua disebut sebagai *reciprocal exchange*.

Penelitian yang mengkaji bagaimana kegiatan prostitusi di kawasan wisata antara lain dilakukan oleh Pitana, dkk. (Pitana & Gayatri, 2005), yang meneliti prostitusi di kawasan wisata Kuta, Bali. Bisnis prostitusi di Kuta semakin marak dan berkembang yang ditandai dengan jumlah Pekerja Seks Komersial (PSK) yang jumlahnya terus berkembang. PSK di Kuta Bali dapat diklasifikasikan atas jenis kelamin, yaitu PSK wanita dan PSK laki-laki (gigolo). Khusus PSK wanita dapat dibagi ke dalam empat kelas, yakni PSK kelas atas, PSK kelas menengah atas, PSK kelas menengah bawah, dan PSK kelas bawah.

Berbeda dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh Pitana, dkk., yang hasil penelitiannya menemukan klasifikasi dan kelompok kelas PSK, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan bagaimana bentuk (konstruksi) jaringan sosial praktik prostitusi terselubung di kawasan kota wisata Batu, khususnya di kawasan wisata Songgoriti. Fokus penelitian ini diarahkan kepada: (1) bagaimana bentuk jaringan sosial praktik prostitusi terselubung di kawasan wisata kota Batu?; (2) bagaimanakah peran dan fungsi masing unit dalam jaringan sosial praktik prostitusi terselubung di kawasan wisata kota Batu?.

Hasil penelitian ini penting mengingat bahwa upaya untuk mengatasi (mencegah) praktek prostitusi, termasuk praktek prostitusi terselubung, maka harus dilakukan pula upaya-upaya memutus jaringan sosial antar *stakeholders* yang terlibat dalam praktek prostitusi tersebut.

METODE

Penelitian ini menggunakan paradigma interpretif-konstruktivis (*constructivism-interpretive*) (Denzim & Lincoln, 2009). Menurut Denzim dan Guba (Salim, 2001), tujuan penelitian (*inquiry aim*) dari paradigma interpretif-konstruktivisme adalah untuk mengadakan pemahaman dan rekonstruksi *social action*. Menurut Marvasti (2004), tujuan dari penelitian *constructionism* adalah berkaitan dengan bagaimana variasi kultural dan situasional mewarnai sebuah realitas (*How do situational and cultural variations shape reality*).

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Menurut Denzim dan Lincoln (2009), kata kualitatif menyiratkan penekanan pada proses dan makna yang tidak dikaji secara ketat atau belum diukur dari sisi kuantitas, jumlah, intensitas, atau frekuensinya. Menurut Marvasti (2004), penelitian kualitatif memberikan penjelasan rinci dan analisis kualitas, atau substansi, dari pengalaman manusia.

Jenis atau metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus (*case study*), dengan alasan bahwa fenomena praktek prostitusi terselubung di kawasan wisata Songgoriti merupakan fenomena sosial yang memiliki karakteristik dan keunikan tersendiri. Menurut Denzim dan Guba (Salim, 2001), studi kasus (*case study*) adalah merupakan salah satu metode dari penelitian dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus memfokuskan dirinya untuk mengetahui keumuman (*diversity*) dan kekhususan (*particularities*) dari objek studi yang menjadi sasaran penelitian. Menurut Smith (Denzim & Lincoln, 2009), kasus adalah suatu "*system yang terbatas*". Keunikan kasus pada umumnya berkaitan dengan: (1) ciri khas/hakikat dari kasus; (2) latar belakang historis;

(3) konteks/setting fisik; (4) konteks kasus, khususnya ekonomi, politik, hukum, dan estetika; (5) kasus-kasus lain yang denganya suatu kasus dapat dikenali; dan (6) para informan atau pemberi informasi yang menjadi sumber dikenalnya kasus (Denzim & Lincoln, 2009; Denzim & Guba, 2001).

Setting (lokasi) penelitian ini di wilayah kota Batu, khususnya di kawasan wisata Songgoriti, Batu. Subjek dan informan penelitian ditentukan berdasarkan teknik *purposive or judgemental sampling* (Babbie, 2008; Neuman, 2007). Teknik *purposive sampling* digunakan dalam situasi di mana peneliti menggunakan pertimbangan-pertimbangan tertentu dengan tujuan yang khusus, yakni bahwa yang menjadi subjek dan informan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang memahami tentang praktik prostitusi terselubung di kawasan wisata Songgoriti, Kota Batu. Oleh karena itu yang menjadi subjek dan informan penelitian ini meliputi: pramuwisata (*tourguide*), tukang ojek, petuah Desa Songgokerto, pemilik villa, warga yang berjualan di sekitar kawasan wisata, dan Pekerja Seks Komersial (PSK).

Dalam penelitian ini, secara garis besar proses pengumpulan data menggunakan tiga (tiga) metode pokok yang saling berkaitan dan melengkapi, yaitu: (1) Wawancara mendalam (*In-depth Interview*), yang dilakukan untuk mendapatkan data-data langsung dari subjek penelitian terkait aktivitas praktek prostitusi; (2) Observasi (*observation*), yang dilakukan untuk memantau situasi dan kondisi kawasan wisata Songgoriti; dan (3) Dokumentasi (*Documentation*), yakni melakukan analisis data dari sumber-sumber sekunder, seperti data jumlah villa, jumlah pengunjung, dan sebagainya.

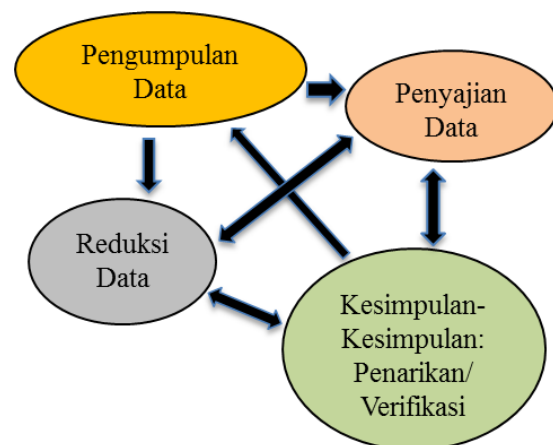
Dalam teknik keabsahan data. peneliti memfokuskan pada kriteria kredibilitas

(*credibility*) dan kepastian (*confirmability*). Teknik kredibilitas (*credibility*) yang digunakan adalah: perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, dan kecukupan referensial. Sedangkan teknik kepastian (*confirmability*) menggunakan teknik uraian rinci dan teknik audit kebenaran (Denzin & Guba, dalam Salim, 2001).

Sedangkan teknik analisa data dilakukan melalui tahap-tahap proses data kualitatif yang mengacu kepada pendapat Miles dan Huberman (1992), yakni: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (verifikasi). Ketiga proses analisis data tersebut, yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (verifikasi) merupakan proses simultan dan interaktif yang digambarkan oleh Miles dan Huberman (1992) sebagai berikut:

Komponen-Komponen Analisis Data

Model Interaktif



Sumber: Miles & Huberman, 1992: 20.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Praktik Prostitusi Terselubung di Kawasan Wisata Songgoriti, Kota Batu:

Kawasan wisata Songgoriti, Kota Batu, Malang, selain terkenal sebagai daerah wisata pemandian air panas juga terkenal dengan keberadaan villan-nya. Namun villa yang dimaksud disini lebih kepada rumah sewa yang menyewakan kamar-kamarnya untuk tempat

penginapan. Meski memang ada beberapa yang berupa villa secara asli namun lebih banyak yang berupa rumah sewa. Keberadaan villa di kawasan Songgoriti awal mulanya tercipta karena pengaruh adanya Hotel Songgoriti yang telah lama menjadi ikon daerah tersebut.

Tarif yang diberikan untuk penyewaan villa juga beragam. Rsd (35 tahun) salah satu pemilik villa menyatakan bahwa untuk tarif sewa kamar berkisar mulai dari Rp 50 Ribu untuk waktu kurang dari 6 jam, dan untuk sewa satu hari sekitar Rp 75 Ribu. Namun harga tersebut berbeda dengan sewa satu rumah secara utuh. Seperti yang dinyatakan oleh bapak TP selaku Ketua Paguyuban “Villa Supo”, bahwa untuk rumah dengan tiga kamar tarif sewanya bisa Rp 300 Ribu dan untuk yang 4 kamar biasanya disewakan sekitar Rp 400 Ribu per-malamnya. Akan tetapi harga tersebut bisa naik sampai dua kali lipat untuk hari Sabtu dan Minggu, bahkan jika hari libur nasional harga sewanya bisa naik menjadi 15-20 kali lipat.

Fasilitas yang diberikan villa kepada para pengunjungnya pun termasuk dalam taraf yang baik untuk sebuah penginapan. Ada tiga klasifikasi yang membedakan villa-villa tersebut, yakni: (1) Klasifikasi A yang letaknya berada di pinggir jalan yang memiliki fasilitas 3-5 kamar yang dilengkapi *bath-up* dan *shower*; (2) Klasifikasi B yang lokasinya masuk gang dengan fasilitas 2-3 kamar yang dilengkapi kamar mandi dalam walaupun masih sederhana; dan (3) Klasifikasi C berada di daerah pojok-pojok kampung dengan fasilitas yang sederhana.

Wilayah Songgoriti memang merupakan kawasan wisata yang sangat indah. Letaknya berada di daerah lereng pegunungan, udaranya sejuk dengan pepohonan rindang yang menyelimutinya. Ditambah lagi dengan keberadaan pemandian air panas dan villa-villa yang berjejeran untuk tempat penginapan.

Namun ironisnya, banyak kalangan yang kemudian menyalahgunakan keberadaan villa-villa tersebut. Para tamu yang menginap di villa banyak yang bertujuan untuk menyewa Pekerja Seks Komersial (PSK), atau mereka yang merupakan pasangan kekasih yang hanya ingin melepaskan hasrat seksual mereka. Dalam hal ini berarti keberadaan villa menunjang adanya seks bebas, baik di kalangan pelajar, mahasiswa, dan pasangan selingkuh yang tidak memiliki ikatan pernikahan, dan sebagainya.

Para tamu (pengguna jasa PSK) yang menginap di villa kawasan Songgoriti dapat memesan Pekerja Seks Komersial (PSK) sesuai dengan yang diinginkan, yang dilayani selama 24 jam. Usia PSK yang dapat dipesan (dibooking) disesuaikan dengan jam pemesanan. Untuk PSK yang berstatus pelajar SMA/SMP dapat dipesan pada jam 16.00-20.00 WIB, sedangkan untuk PSK yang berstatus mahasiswa dapat dipesan pada jam 20.00-23.00 WIB, sementara untuk PSK usia diatas 25 tahun dapat dipesan pada jam 23.00-07.00 wib. Seperti yang diungkapkan salah satu pemilik villa Rh (27 tahun), sebagai berikut:

“Kalo disini jamnya sudah ditentukan, jadi tertata rapi, mulai dari SMP-SMA jam 16.00 – 20.00 wib, mahasiswa mulai jam 20.00-23.00 wib, berumur diatas 25 tahun jam 23.00 – 07.00 WIB”.

Alasan pembagian waktu bagi PSK pelajar, Mahasiswa, dan umum ini lebih didasarkan kepada masalah waktu saja, agar tidak dicurigai. Bagi para pelajarn SMP/SMA batas waktu pulang pulang ke rumah atau tempat kost tidak boleh lebih dari jam 20.00 WIB, dan untuk mahasiswa tidak boleh lebih dari jam 23.00 WIB. Sementara untuk PSK non pelajar/mahasiswa tidak ada batas waktu pulang ke rumah/tempat kost.

Para pengguna jasa PSK yang berkeinginan menyewa para pemuas seks ini harus mengikuti aturan main yang telah ditentukan oleh si penjual, dengan catatan harus setuju dengan kesepakatan yang disampaikan sebelum memakai jasa pemuas seks tersebut. Mereka dapat menyewa Pekerja Seks Komersial (PSK) tanpa harus ada rasa takut akan keamanan ataupun adanya razia dari pihak pemerintah. Tarif PSK rata-rata untuk semua jenis usia berkisar mulai dari Rp 250 Ribu untuk waktu satu jam (*short time*), dan sebesar Rp 1,5 Juta untuk satu malam (*long time*). Para Pekerja Seks Komersial (PSK) di kawasan Songgortiti jumlahnya sekitar 85 orang seperti yang diungkap oleh Cp (19 Tahun), yaitu:

“Di sini gak terlalu banyak mbak, cuma ada di dua tempat, itupun dibagi 2 jumlahnya.. Separuh-separuh jadi sama rata. Asalnya juga berbeda-beda rata-rata masih wilayah Jawa Timur. Dari 85 orang, 12 orang asli Batu tapi gak ada yang tinggal disini mbak”.

Penuturan Cp tersebut menggambarkan bahwasannya manajemen prostitusi di kawasan Songgortiti ini telah tersusun sedemikian rupa sehingga tidak terlihat dengan menonjol, masyarakat luar tidak akan tahu apabila masyarakat tidak memperhatikan dan mengamati kawasan ini dengan seksama.

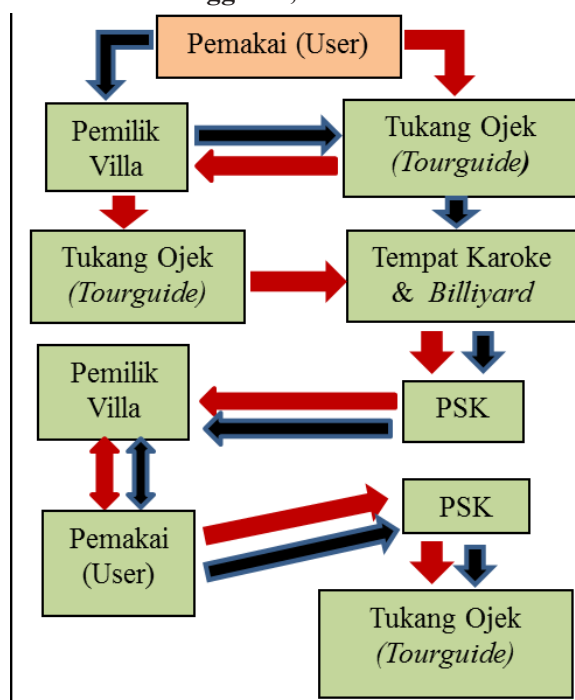
Ada tiga kesempatan pemesan untuk mengganti Pekerja Seks Komersial (PSK), apabila pilihan pertama tidak cocok maka si pemesan hanya membayar uang *tourguide* (ojek) sebesar Rp 25 ribu, kesempatan kedua sama dengan kesemptan pertama, sedangkan pada kesempatan ketiga apabila pemesan masih belum sesuai, pemesan harus membayar ojek serta separuh tarif dari harga Pekerja Seks Komersial (PSK) per-sekali main (*short time*). Pekerja Seks Komersial (PSK) sangat dirahasiakan identitasnya dan tidak diperkenankan memberikan nomor *contact*

person yang ia milki kepada pelanggan yang di layaninya.

Alur relasi (transaksi) dalam praktik prostitusi terselubung di kawasan wisata Songgortiti, Kota Batu, terjadi melalui dua alur, yakni alur 1 yang terjadi antara: Pemakai (*user*), Pemilik Villa, Tukang Ojek (*tourguide*), Tempat Karaoke, PSK, Pemilik Villa, Pemakai Jasa, PSK, dan Tukang Ojek. Sementara alur 2 yang terjadi antara: Pemakai (*user*), Tukang Ojek (*tourguide*), Pemilik Villa, Tukang Ojek, Tempat Karaoke, PSK, Pemilik Villa, Pemakai Jasa, PSK, dan Tukang Ojek. Jadi para pemakai (*user*) jasa PSK dapat melakukan transaksi melalui pihak pemilik villa atau melalui pihak tukang ojek (*tourguide*), sebagaimana digambarkan dalam bagan 1 berikut ini:

Bagan 1:

Alur Relasi dalam Jaringan Sosial Praktik Prostitusi Terselubung di Kawasan Wisata Songgortiti, Kota Batu.



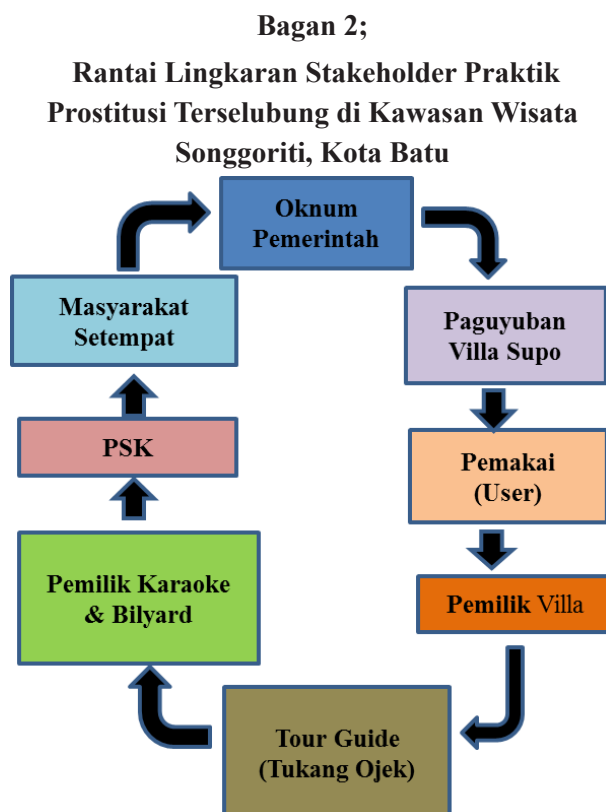
Sumber: Hasil Penelitian

Keterangan:
 Alur 1
 Alur 2

Bentuk Jaringan Sosial Praktik Prostitusi Terselubung di Kawasan Wisata Songgoriti, Kota Batu:

Jaringan sosial praktik prostitusi terselubung di kawasan wisata Songgoriti, Kota Batu, melibatkan berbagai *stake-holder*, yakni: Oknum pemerintah, paguyuban Villa Supo, pemakai/pengguna jasa PSK (*user*), warga pemilik villa, tukang ojek (*tour-guide*), pemilik tempat Karaoke dan *Bilyard*, Pekerja Seks Komersial (PSK), dan masyarakat setempat. Para *stakeholder* tersebut membuat suatu rantai jaringan yang saling mendukung dan saling menguntungkan, khususnya secara ekonomis.

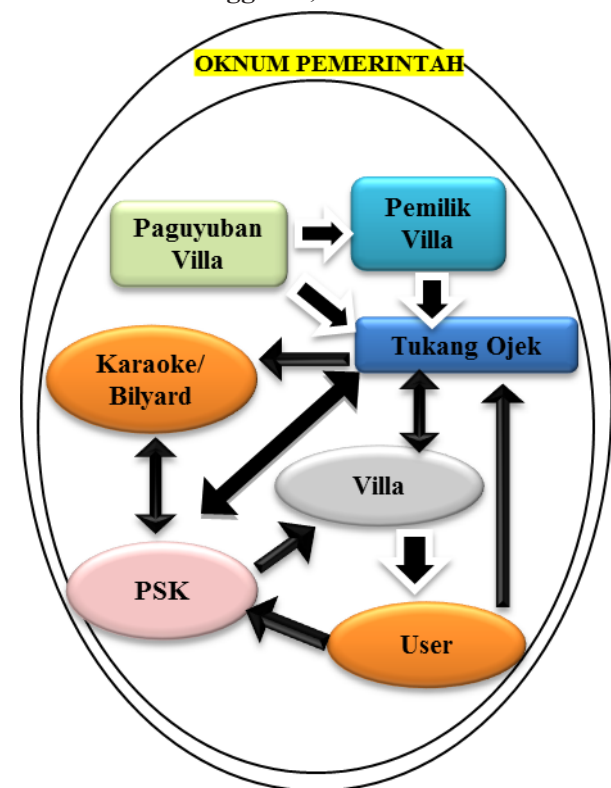
Hubungan antar-*stakeholders* dalam praktik prostitusi terselubung di kota Batu, membentuk suatu rantai lingkaran yang saling terkait, yang dapat digambarkan dalam bagan 2 berikut ini:



Selanjutnya, munculnya fenomena praktik prostitusi terselubung di kawasan wisata

Songgoriti, Kota Batu, melibatkan pola relasi dan interaksi antar *stake-holder* dalam jaringan sosial yang saling mendukung dan menguntungkan. Pola relasi dan interaksi antar *stake-holder* dalam praktik prostitusi terselubung di kawasan wisata Songgoriti, Kota Batu ini sudah terjalin dengan rapi. Pola relasi/interaksi tersebut sebagaimana digambarkan dalam bagan 3 berikut ini:

Bagan 3:
Pola Interaksi Jaringan Sosial Praktik Prostitusi Terselubung di Kawasan Wisata Songgoriti, Kota Batu

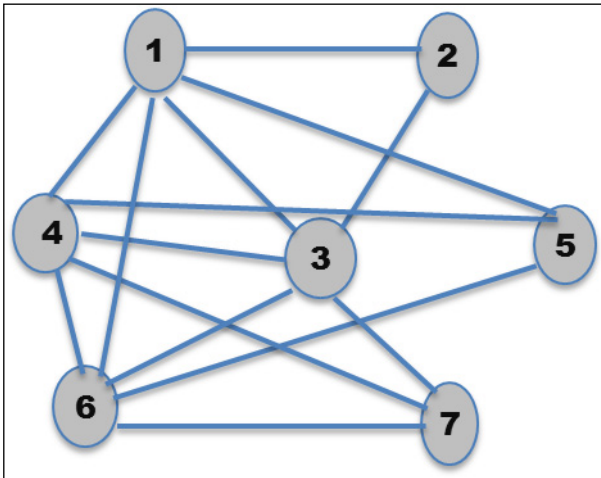


Keterangan:
 ➡ Interaksi searah
 ↔ Interaksi dua arah

Sedangkan pola jaringan sosial praktek prostitusi terselubung di kawasan wisata Songgoriti Kota Batu, dapat digambarkan dalam bentuk simpul jaringan sosial sebagai berikut:

Bagan 4:

**Simpul Jaringan Sosial Praktik Prostitusi
terselubung di Kawasan Wisata Songgoriti,
Kota Batu**



Keterangan:

1. Oknum Pemerintah
2. Paguyuban Villa
3. Pemilik Villa
4. Tukang Ojek (Touguide)
5. Tempat/Pemilik Karaoke & Bilyard
6. PSK
7. User (Pengguna Jasa PSK)

Sedangkan fungsi masing-masing *stakeholders* dalam simpul jaringan sosial praktik prostitusi terselubung di kawasan wisata Songgoriti, Kota Batu, sebagaimana dijelaskan dalam tabel 1 berikut ini:

Tabel 1:

**Fungsi Masing-Masing Simpul Jaringan Sosial Praktik Prostitusi Terselubung
di Kawasan Wisata Songgoriti, Kota Batu**

No	Simpul Jaringan	Fungsi
1.	Oknum pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> Sebagai pelindung pengamanan bisnis prostitusi terselebung. Termasuk pengguna jasa prostitusi.
2.	Pemakai/pengguna Jasa PSK (<i>User</i>)	<ul style="list-style-type: none"> Pihak yang menentukan (memesan) berapa pemakaian PSK. Pihak yang menjadi pemeran utama dalam alur praktik prostitusi terselubung. Menjadi konsumen villa dan PSK Secara tidak langsung bisa menjadi sebagai media informasi kepada konsumen lainnya, mengenai adanya prostitusi di Songgoriti.
3.	Pemilik Villa	<ul style="list-style-type: none"> Memberi tahukan aturan pemakain Villa. Memberikan informasi aturan pemakain dan harga PSK. Memberikan Alat kontrasepsi apabila pemakai (user) tidak membawa tetapi dengan membayar perkotak. Sebagai penyalur antara Ojek (Tourguide) dengan PSK. Sebagai penyalur antara Pemakai (user) dengan PSK. Menentukan tarif pemakaian jasa prostitusi.
4.	Ojek (<i>Tourgu-ide</i>)	<ul style="list-style-type: none"> Sebagai penawar (<i>marketing</i>) lokasi villa dan PSK. Menjemput dan mengantarkan PSK yang akan di pakai. Sebagai pihak yang memberikan informasi tentang villa dan PSK. Sebagai penyalur pemakai (<i>User</i>) dengan pemilik villa.
5.	PSK	<ul style="list-style-type: none"> Menentukan jam pemakain jasanya. Melayani Pemakai (<i>User</i>). Memberikan tips kepada ojek (<i>tourguide</i>) sebesar 10% dari tarif sekali main.
6.	Paguyuban Villa “Supo”	<ul style="list-style-type: none"> Sebagai komunitas yang mawadahi, penghubung para pemilik Villa ke pemerintah dalam bentuk perizinan usaha. Sebagai payung hukum yang membawahi keseluruhan pihak yang terlibat Menjaga, mengatur dan menjamin keamanan kawasasn Villa Songgoriti
7.	Pemilik Karaoke/Bilyard	<ul style="list-style-type: none"> Menyediakan PSK

Selanjutnya, pembagian pendapatan bagi masing-masing pihak (simpul) dalam jaringan dapat dijelaskan sebagai berikut: pihak pemilik villa memperoleh pendapatan dari hasil sewa villa dan penjualan alat kontrasepsi, tukang ojek (*tourguide*) memperoleh pendapatan dari sewa ojek untuk antar-jemput PSK dan tips 10% dari PSK, sementara untuk PSK memperoleh pendapatan dari pembayaran jasa (sewa booking), dan pihak paguyuban villa memperoleh pendapatan dari iuran anggota pemilik villa.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian data hasil penelitian, selanjutnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama; Jaringan Sosial yang terbentuk dalam praktik prostitusi terselubung di kawasan wisata Songgoriti, Kota Batu, merupakan faktor yang mempertahankan dan memperkuat praktik prostitusi di kawasan wisata tersebut. Jaringan sosial yang terjalin antara pihak satu sama lain akan memudahkan dalam pengelolaan, mempertahankan, dan menutupi praktik prostitusi terselubung tersebut. Jaringan Sosial dalam praktik prostitusi terselubung di kawasan Songgoriti melibatkan berbagai pihak, yakni: Pemakai (*user*), ojek (*tourguide*), pemilik villa, Pekerja Seks Komersial (PSK), pemilik usaha karaoke dan *billiard*, Oknum Pemerintah, masyarakat Songgoriti. Stakeholder-stakeholder tersebut terbentuk karena berdasarkan jaringan kepentingan (*interest*) yang sama, khususnya kepentingan ekonomi (bisnis).

Kedua; Fungsi dan peran masing-masing pihak dalam Jaringan Sosial praktik prostitusi terselubung di kawasan wisata Songgoriti meliputi: (1) Tukang Ojek (*tourguide*) berfungsi sebagai penyalur pemakai (*user*) dan menjemput serta mengantar Pekerja Seks Komersial (PSK) bekerja; (2) Pemilik Villa berfungsi sebagai penyedia tempat untuk melakukan kegiatan

praktik prostitusi; (3) Pekerja Seks Komersial (PSK) berfungsi sebagai pelayan serta sebagai daya tarik pemakai (*user*); (4) Tempat Karaoke (*Billiard*) berfungsi sebagai tempat penampung PSK sebelum di sewa oleh pemakai (*user*); dan (5) Pemakai (*user*) berfungsi sebagai konsumen yang menggunakan jasa prostitusi dan penyewa villa.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian maka peneliti dapat memberikan saran-saran untuk beberapa instansi adalah sebagai berikut:

Pertama; Mengingat bahwa fenomena praktik prostitusi terselubung di kawasan wisata Songgoriti, Kota Batu, melibatkan jaringan sosial berbagai stakeholders, maka upaya untuk menghilangkan/mengatasinya memerlukan pendekatan yang komprehensif dan integratif terhadap berbagai stakeholders tersebut.

Kedua; Bagi Dinas Pariwisata dan Satpol PP Kota Batu, agar lebih memperhatikan kenyamanan industri pariwisata sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata yang secara tegas melarang penggunaan usaha yang tidak sesuai dengan peruntukannya, termasuk penyediaan fasilitas villa yang mendukung munculnya praktik prostitusi terselubung;

Ketiga; Bagi Dinas Sosial Kota Batu agar proaktif dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat kawasan Songgoriti dan para Pekerja Seks Komersial (PSK) tentang dampak negatif praktik prostitusi bagi kehidupan sosial; dan

Keempat; Bagi masyarakat yang tinggal di kawasan wisata Songgoriti, khususnya para pemilik villa, agar selektif dalam memilih tamu yang ingin menginap, serta tidak memberikan peluang munculnya praktik prostitusi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung kelancaran pelaksanaan penelitian ini, khususnya kepada Dekan dan para Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memfasilitasi kegiatan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Babbie, Earl. (2008). *The Basics of Social Research*. Belmont, USA: Thomson Wadsworth.
- Damanik, Janianti; Kusworo, Hendrie Adji; & Raharjana, Destha T (Peny.). (2005). *Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pariwisata*. Yogyakarta: Kepel Press.
- Denzin, Norman K.; & Lincoln, Yvonna S. (2009). *Handbook of Qualitative Research* (terj.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gelgel, I Putu. (2006). *Industri Pariwisata Indonesia: Dalam Globalisasi Perdagangan Jasa (GATS-WTO), Implikasi Hukum dan Antisipasinya*. Bandung: ADITAMA.
- Kartono, Kartini. (1981). *Patologi Sosial*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Koentjoro. (2004). *On The Spot: Tutur Dari Seorang Pelacur*. Yogyakarta: Qalam.
- Marvasti, Amir B. (2004). *Qualitative Research in Sociology: An Introduction*. London: SAGE Publications.
- Miles, Matthew B.; & Huberman, A. Michael. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Neuman, W. Lawrence. (2007). *Basics of Social Research: Qualitative and Quantitative Approaches*. Boston: Pearson Education, Inc.
- Parrillo, Vincent N. (2005). *Comtemporary Social Problems*. Boston: Pearson.
- Pendit, Nyoman S. (2006). *Ilmu Pariwisata: Sebuah Pengantar Perdana*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Pitana, I Gd., & Gayatri, Putu G. (2005). *Sosiologi Pariwisata*. Yogyakarta: ANDI.
- Salim, Agus (peny.). (2001). *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial: Pemikiran Norman K. Denzin & Egon Guba, dan penerapannya*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Soedjono, D. (1997). *Pelacuran Ditinjau Dari Segi Hukum dan Kenyataan Dalam Masyarakat*. Bandung: Karya Nusantara.
- Spillane, James J. (ed.). (2003). *Wisata Seks dalam Industri Pariwisata Peluang atau Ancaman?*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Turner, Jonathan H. (1998). *The Struktur of Sociological Theory*. Sixth Edition. Belmont: Wadsworth Publishing Company.
- Wahab, Salah. (2003). *Manajemen Kepariwisataaan*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Wasserman, Stanley; & Faust, Katherine. (1994). "Social Network Analysis in the Social and Behavioral Sciences". *Social Network Analysis: Methods and Applications*. Cambridge University Press. pp. 1–27. [ISBN 9780521387071](https://doi.org/10.1017/9780521387071).
- Yin, Robert K. (2011). *Qualitative Research from Start to Finish*. New York: The Guilford Press.
- Yoeti, Oka A. (2006). *Pariwisata Budaya: Masalah dan Solusinya*. Jakarta: Pradnya Paramita.